



UJI VALIDITAS INDIKATOR–INDIKATOR PEMERINGKATAN E-GOVERNMENT INDONESIA (PeGI) TINGKAT PROVINSI DENGAN ANALISIS FAKTOR

VALIDITY TEST OF PROVINCIAL LEVEL OF PEGI INDICATORS USING FACTOR ANALYSIS

¹Dewi Hernikawati dan ²Dana Indra Sensuse

¹Balai Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika Jakarta, Kementerian Komunikasi dan Informatika
Jl. Pegangsaan Timur No.19B, Pegangsaan, Menteng, Kota Jakarta Pusat

²Magister Teknologi Informasi, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Indonesia

¹dewi005@kominfo.go.id, ²dana@cs.ui.ac.id

Naskah Diterima: 26 Februari 2016; Direvisi : 26 April 2016; Disetujui : 9 Agustus 2016

Abstrak

Faktor penilaian PeGI terdiri dari dimensi kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, aplikasi, dan perencanaan. Implementasi *e-government* tingkat provinsi belum optimal, pada tahun 2011, hanya 7 provinsi yang mendapat peringkat baik dari 26 provinsi yang dinilai. Penelitian ini bertujuan untuk menguji validitas indikator-indikator dari dimensi kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, aplikasi, dan perencanaan. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik analisis faktor. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa seluruh indikator untuk dimensi kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, dan perencanaan valid digunakan dalam penilaian PeGI. Adapun indikator dimensi aplikasi tidak semuanya valid, indikator yang tidak valid adalah aplikasi manajemen keuangan.

Kata kunci : analisis faktor; *e-government*, validitas, PeGI.

Abstract

PeGI assessment consists of dimensions of policy, institutional, infrastructure, application, and planning. Implementation of *e-government* at the provincial level is unoptimal, in 2011, there were only 7 provinces that received good ratings out of 26 provinces were assessed. This study aims to test the validity of the indicators of the dimensions of policy, institutional, infrastructure, application, and planning. This research uses quantitative approach method. Data analysis are performed using factor analysis. The results of this study show that all indicators of the dimensions of policy, institutional, infrastructure, and planning are valid and can be used for the assessment of the implementation of *e-government* at the provincial level. Moreover, financial management application is an invalid indicator of application dimension.

Keywords: factor analysis, *e-government*, validity, PeGI

PENDAHULUAN

Penerapan *e-government* tingkat provinsi dilatarbelakangi oleh Inpres No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional yang mewajibkan kementerian/ lembaga negara, provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia menerapkan *e-government*. Tujuan yang ingin dicapai dalam penerapan *e-government* adalah meningkatkan kualitas pelayanan sehingga proses pemerintahan menjadi lebih efektif dan efisien.

Menurut Nag Yeon Lie (2010), *e-government* secara umum didefinisikan sebagai penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk meningkatkan kinerja dari fungsi dan layanan pemerintah tradisional. Tujuan pelaksanaan *e-government* adalah penyampaian layanan pemerintah kepada masyarakat dengan lebih efektif. Pelaksanaan *e-government* dinilai sukses jika berhasil melakukan layanan pemerintah *online*, tanpa kertas, berbasis pengetahuan, dan transparan. Interaksi yang terlibat dalam pelaksanaan *e-government* dalam memberikan layanan dapat berupa layanan antarlembaga pemerintah (G2G), layanan antara lembaga pemerintah dengan masyarakat (G2C), dan layanan antara lembaga pemerintah dengan bisnis (G2B).

Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika melaksanakan Pemeringkatan *e-Government* Indonesia (PeGI) untuk melihat kondisi umum penerapan pelaksanaan *e-government* di Indonesia. PeGI sudah dilaksanakan sejak tahun 2007 dengan tahap pelaksanaan penilaian yaitu mengakses kementerian/ lembaga, kemudian provinsi dan kabupaten/ kota. Hasil PeGI tahun 2011 menunjukkan bahwa dari 26 provinsi yang

mengikuti PeGI, hanya 7 provinsi yang mendapat peringkat baik, 12 provinsi mendapat peringkat kurang, dan 7 provinsi lainnya mendapat peringkat sangat kurang (Direktorat *e-Government*, 2011). Data tersebut menunjukkan bahwa implementasi PeGI belum diterapkan secara optimal di seluruh daerah. Selain itu, PeGI sudah dilaksanakan dalam waktu yang cukup lama yaitu sejak tahun 2007 disertai dengan perkembangan teknologi informasi yang pesat. Oleh karena itu, penelitian ini ingin melihat apakah dimensi-dimensi penilaian yang telah dilakukan selama ini masih valid dan bisa digunakan untuk pemeringkatan *e-government* atau tidak.

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah tepat atau tidaknya indikator-indikator pada dimensi-dimensi PeGI (dimensi kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, aplikasi, dan perencanaan).

Penelitian ini bertujuan untuk menguji validitas indikator-indikator dari dimensi kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, aplikasi, dan perencanaan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam menyusun kebijakan terkait pelaksanaan *e-government* di tingkat provinsi agar implementasinya bisa berjalan dengan optimal dan dapat menjadi masukan bagi pengembangan kerangka kerja PeGI.

Pengertian e-Government

e-Government adalah penggunaan teknologi informasi oleh instansi pemerintah seperti *Wide Area Network*, internet, dan *mobile computing* yang mengubah pola hubungan antara pemerintah,

masyarakat, dan kalangan bisnis. Tujuan pelaksanaan *e-government* ini dapat memberikan layanan pemerintah yang lebih baik kepada masyarakat, meningkatkan interaksi dan hubungan dengan bisnis serta industri, pemberdayaan masyarakat melalui akses informasi, atau menjadikan manajemen pemerintahan lebih efisien. Manfaat yang diperoleh dengan implementasi *e-government* ini dapat mengurangi korupsi, meningkatkan transparansi, memberikan kenyamanan bagi masyarakat, meningkatkan pendapatan, dan mengurangi biaya (Worldbank, 2011). Penerapan *e-government* bertujuan agar interaksi antara pemerintah dengan masyarakat (G2C), pemerintah dengan kalangan bisnis (G2B), dan pemerintah dengan pemerintah (G2G) menjadi lebih ramah, mudah, transparan, dan murah.

e-Government didefinisikan sebagai penggunaan TIK yang membuat pemerintahan menjadi lebih efektif dan efisien, memberikan akses informasi lebih luas kepada masyarakat, dan menjadikan pemerintah lebih bertanggung jawab kepada masyarakat. Layanan ini bisa dilakukan melalui internet, telepon, pusat-pusat komunitas dengan layanan sendiri atau difasilitasi orang lain, perangkat nirkabel, atau sistem komunikasi. *e-Government* merupakan suatu proses yang panjang dan tidak bisa dilakukan dengan cepat. Hal ini juga membutuhkan biaya yang besar dengan risiko yang harus dihadapi (*Pacific Council International Policy*, 2002).

Pengertian lain dari *e-government* menurut Palvia, Shailendra dan Sharma (2007) adalah penggunaan teknologi informasi terutama internet untuk meningkatkan pelayanan yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat, bisnis, dan instansi

pemerintah lainnya. *e-Government* memungkinkan masyarakat melakukan interaksi dan menerima layanan/ jasa dari pemerintah federal, negara bagian atau lokal selama dua puluh empat jam sehari dan tujuh hari seminggu.

Dari pengertian-pengertian *e-government* tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa *e-government* adalah penggunaan TIK oleh pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, bisnis, dan sesama pemerintah agar pelayanan yang diberikan menjadi lebih efektif dan efisien. Implementasi *e-government* bermanfaat dalam meningkatkan kualitas dan memperbaiki layanan yang diberikan pemerintah, meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas penyelenggaraan negara, serta mengurangi biaya administrasi dan interaksi antara pemerintah dengan masyarakat, bisnis, dan sesama pemerintah.

Peningkatan e-Government Indonesia (PeGI)

Peningkatan *e-government* di Indonesia bertujuan untuk mengetahui sejauh mana implementasi *e-government* di Indonesia atau gambaran umum mengenai status dan kondisi *e-government* di Indonesia. Tujuan utama PeGI adalah menyediakan acuan bagi pengembangan dan pemanfaatan TIK di lingkungan pemerintah serta memberikan dorongan bagi peningkatan pemanfaatan TIK di lingkungan pemerintah melalui evaluasi yang utuh, seimbang, dan objektif. Selain itu, PeGI dilaksanakan untuk mendapatkan peta kondisi pemanfaatan TIK di lingkungan pemerintah secara nasional (Direktorat *e-Government*, 2011).

PeGI dalam penilaiannya melibatkan 5 dimensi antara lain kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, aplikasi, dan perencanaan. Indikator-indikator dari

setiap dimensi PeGI adalah sebagai berikut :

1. Dimensi Kebijakan

Pada dimensi kebijakan ini penilaian dilakukan terhadap manajemen /proses kebijakan serta visi dan misi terkait TIK yang dibuktikan dalam bentuk surat keputusan, peraturan, regulasi, kebijakan, pedoman, atau rencana strategis. Indikator lainnya adalah strategi penerapan kebijakan TIK, peraturan terkait pemanfaatan TIK, keputusan instansi terkait penerapan TIK, skala prioritas dalam penerapan TIK, dan manajemen risiko/ evaluasi dari penerapan TIK. Penilaian ini berdasarkan pada dokumen-dokumen resmi yang memiliki kekuatan hukum.

2. Dimensi Kelembagaan

Dimensi ini berkaitan dengan keberadaan organisasi, lembaga, atau unit kerja yang berwenang dan bertanggung jawab dalam pengembangan dan pelaksanaan *e-government*. Penilaian pada dimensi kelembagaan dilakukan terhadap aspek keberadaan struktur organisasi yang efektif, adanya dokumen tentang rumusan tugas dan fungsi yang dilakukan oleh organisasi atau unit kerja (tupoksi), ketersediaan sistem dan prosedur yang lengkap dan terdokumentasi, ketersediaan SDM dengan jumlah dan tingkat kompetensi yang sesuai, serta program pengembangan SDM TIK.

3. Dimensi Infrastruktur

Dimensi infrastruktur penilaiannya meliputi keberadaan *data center* dan aplikasi pendukung, jaringan komunikasi (LAN, WAN, internet), keamanan, fasilitas pendukung, dokumen *disaster recovery* jika terjadi kegagalan sistem, pemeliharaan infrastruktur TIK, dan inventarisasi peralatan TIK.

4. Dimensi Aplikasi

Penilaian pada dimensi aplikasi meliputi 10 indikator yaitu situs web (*homepage*), aplikasi Fungsional Utama 1 terkait pelayanan publik, aplikasi Fungsional Utama 2 terkait fungsi administrasi dan manajemen umum, aplikasi Fungsional Utama 3 terkait fungsi administrasi legislasi, aplikasi Fungsional Utama 4 terkait fungsi manajemen pembangunan, aplikasi Fungsional Utama 5 terkait fungsi manajemen keuangan, dan aplikasi Fungsional Utama 6 terkait fungsi manajemen kepegawaian, dokumentasi, inventarisasi aplikasi TIK, dan interoperabilitas aplikasi. Evaluasi ini dilakukan untuk melihat kesesuaian antara ketersediaan dan tingkat pemanfaatan sarana dan prasarana dengan tugas dan fungsi instansi.

5. Dimensi Perencanaan

Dimensi perencanaan ini membahas tata kelola atau manajemen perencanaan TIK secara terpadu dan berkelanjutan. Penilaian pada dimensi ini terdiri dari 5 variabel meliputi pengorganisasian/ fungsi, sistem perencanaan, dokumentasi masterplan, implementasi masterplan, dan pembiayaan.

Penelitian sebelumnya dengan judul “Kajian Kerangka Kerja Peningkatan *e-Government* di Tingkat Kabupaten/Kotamadya yang dilakukan oleh Pipin Farida Ariyani (2009) bertujuan untuk melakukan analisis kualitatif terhadap indikator-indikator penilaian PeGI yang masih sesuai untuk diterapkan pada tingkat kabupaten/ kota. Penelitian ini menggunakan *system thinking* dalam pendekatan kualitatif sebagai konsep metodologi yang berorientasi pada organisasi. Data dikumpulkan dengan studi literatur pada objek penelitian dengan

melihat pada indikator-indikator penilaian penelitian sebelumnya dan wawancara mendalam untuk melakukan penilaian dan kecocokan pada objek penelitian. Analisis dilakukan pada dampak negatif yang mungkin terjadi jika indikator pada penilaian PeGI tidak ada.

Hasil penelitian ini adalah dimensi kebijakan yang sesuai untuk diterapkan pada penilaian PeGI adalah Visi dan Misi Penerapan TIK, Strategi Penerapan Kebijakan, Pedoman, Peraturan, Ketetapan Instansi, Anggaran, Skala Prioritas, dan Audit. Dimensi kelembagaan terdiri dari Keberadaan Organisasi, Tupoksi, SOP, SDM, dan Pengembangan SDM. Dimensi infrastruktur menunjukkan indikator-indikator yang valid adalah *Data Center*, Jaringan Data, Keamanan, Fasilitas Pendukung, Infrastruktur TIK, *Disaster Recovery*, Pemeliharaan TIK, dan Inventaris Peralatan TIK. Pada dimensi aplikasi indikator-indikator yang valid adalah Situs Wajib (*Homepage*), Aplikasi Fungsional Utama 1, Aplikasi Fungsional Utama 2, Aplikasi Fungsional Utama 3, Aplikasi Fungsional Utama 4, Aplikasi Fungsional Utama 5, Aplikasi Fungsional Utama 6, Manual/Petunjuk Aplikasi TIK, dan Inventaris Aplikasi TIK. Untuk dimensi perencanaan terdiri dari Pengorganisasian/Fungsi, Masterplan, Sistem Perencanaan, dan Dokumentasi. Rekomendasi dari penelitian ini yaitu merekomendasikan indikator alternatif saluran pelayanan (*e-service channel*) dan indikator respon masyarakat pada dimensi aplikasi sebagai bahan pertimbangan penilaian PeGI tingkat kabupaten/kota.

Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Data

sekunder yang akan digunakan yaitu hasil penilaian implementasi *e-government* di tingkat provinsi (24 provinsi) untuk melihat validitas indikator-indikator dari dimensi kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, aplikasi, dan perencanaan.

Analisis Faktor

Analisis faktor adalah teknik multivariat untuk menghitung korelasi pola antarvariabel pada distribusi vektor acak yang teramati pada jumlah minimal variabel random yang bisa diamati dan biasa disebut sebagai faktor (Giri, 2004). Prinsip dalam analisis faktor yaitu mengekstraksi sejumlah faktor bersama dari variabel asal sehingga banyaknya faktor menjadi lebih sedikit dan sebagian informasi variabel asal tersimpan dalam sejumlah faktor. Secara umum analisis faktor dibagi menjadi dua yaitu analisis faktor eksploratori dan analisis faktor konfirmatori.

Analisis faktor eksploratori bertujuan untuk mengelompokkan variabel-variabel yang ada menjadi satu faktor atau lebih. Contoh analisis faktor eksploratori yaitu jika terdapat 10 variabel maka akan dilakukan analisis faktor untuk melihat berapa faktor yang akan terbentuk dari kesepuluh variabel tersebut, hasilnya bisa 3 faktor terbentuk dengan faktor 1 dijelaskan oleh variabel 1, 2, dan 3. Faktor 2 dijelaskan oleh variabel 4, 5, 6, dan 7 atau faktor 3 akan dijelaskan dengan variabel 8, 9, dan 10. Analisis faktor konfirmatori dilakukan untuk menguji atau mengonfirmasi berdasarkan teori atau konsep yang sudah ada terhadap keakuratan instrumen yang telah dibuat. Misalnya pada faktor A terdapat 5 variabel, maka pada analisis faktor konfirmatori akan diuji apakah 5 variabel tersebut valid untuk menjelaskan faktor A. Pada penelitian

ini analisis faktor yang akan dilakukan adalah analisis faktor konfirmatori.

Pada dasarnya analisis faktor dikelompokkan berdasarkan korelasi antarvariabel yaitu variabel yang memiliki korelasi sangat kuat akan dikelompokkan ke dalam satu faktor, sedangkan jika korelasi antarvariabel tersebut tidak kuat maka akan dikelompokkan pada faktor yang lain (Giri, 2004). Model analisis faktor untuk vektor random teramati X dengan p komponen, memiliki rata-rata μ dan matriks kovarian sebagai berikut :

$$X_1 - \mu_1 = \omega_{11}F_1 + \omega_{12}F_2 + \dots + \omega_{1m}F_m + \varepsilon_1$$

$$X_p - \mu_p = \omega_{p1}F_1 + \omega_{p2}F_2 + \dots + \omega_{pm}F_m + \varepsilon_p$$

Persamaan tersebut dapat ditulis dengan menggunakan notasi matriks sebagai berikut :

$$X_{pxl} = \mu_{(pxl)} + L_{(pxm)}F_{(mxt)} + \varepsilon_{pxl}$$

dengan

- μ_i = rata-rata variabel i
- ε_i = faktor spesifik ke $-i$
- F_j = *common factor* ke- j
- ω_i = *loading* dari variabel ke $-i$ pada faktor ke- j

Bagian dari varian variabel ke $-i$ dari m *common factor* disebut komunalitas ke $-i$ yang merupakan jumlah kuadrat dari *loading* variabel ke $-i$ pada m *common factor* (Johnson & Wichern, 2007), dengan rumus :

$$h_i^2 = \omega_{i1}^2 + \omega_{i2}^2 + \dots + \omega_{im}^2$$

METODE

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif. Teknik pengumpulan data lapangan bertujuan mengumpulkan data sekunder. Data sekunder

adalah data hasil penilaian pemeringkatan *e-government* 24 provinsi di Indonesia yang dilakukan oleh tim *assessment* yang terdiri dari tiga orang penilai untuk setiap provinsi. Jumlah data yang diolah sebanyak 72. Dalam pemeringkatan *e-government* ini digunakan skala 1 sampai dengan 4, angka 1 menunjukkan penilaian sangat kurang, angka 2 diartikan mempunyai nilai kurang, angka 3 menunjukkan nilai yang baik, dan angka 4 dapat diartikan baik sekali.

Analisis data yang digunakan adalah analisis faktor untuk melihat indikator-indikator yang valid pada dimensi-dimensi PeGI. Pengolahan data lapangan dilakukan dengan bantuan SPSS 17. Berdasarkan hasil analisis tersebut kemudian diambil kesimpulan terhadap validitas dari indikator-indikator PeGI.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis faktor dilakukan pada setiap dimensi yaitu kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, aplikasi, dan perencanaan untuk menguji apakah pertanyaan dari indikator-indikator pada setiap dimensi sudah tepat.

Dimensi Kebijakan

KMO/*Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy* menunjukkan kecukupan data yang dipakai dalam penelitian dan seberapa berguna data dalam penelitian. Syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan analisis faktor adalah nilai KMO di atas 0,5 berarti data cukup berguna dalam penelitian. Selain itu data untuk nilai *Bartlett's Test of Sphericity* berada di bawah 0,5. Nilai *Bartlett's Test of Sphericity* menunjukkan seberapa berguna faktor analisis yang dilakukan atau analisis faktor cukup efektif untuk digunakan. Jika nilai signifikansi *Bartlett's Test of Sphericity* berada di

bawah 0,05 artinya faktor analisis cukup efektif untuk digunakan.

Tabel 1. KMO and Bartlett's Test Dimensi Kebijakan

<i>Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.</i>		,893
<i>Bartlett's Test of Sphericity</i>	<i>Sig.</i>	,000

Tabel 1 KMO memiliki nilai 0,893 yang menunjukkan nilai sangat tinggi karena mendekati nilai 1, artinya data cukup efektif digunakan dalam penelitian. Nilai signifikansi *Bartlett's Test of Sphericity* adalah 0,00 atau berada di bawah 0,05, artinya faktor analisis cukup efektif untuk digunakan. Dapat disimpulkan bahwa variabel dan data yang ada bisa digunakan untuk analisis faktor. Karena data sudah memenuhi syarat untuk dilakukan analisis faktor, maka langkah selanjutnya adalah menentukan banyaknya faktor yang akan terbentuk. Jumlah faktor yang terbentuk dapat dilihat dari nilai *Eigenvalues* dengan syarat nilai *Eigenvalues* lebih besar dari satu.

Tabel 2. Total Variance Explained Dimensi Kebijakan

<i>Component</i>	<i>Initial Eigenvalues</i>		
	<i>Total</i>	<i>% of Variance</i>	<i>Cumulative %</i>
1	5,004	62,550	62,550
2	,771	9,642	72,192
3	,656	8,201	80,393
:	:	:	:
8	,186	2,331	100,000

Tabel 2 menunjukkan nilai *Eigenvalues* yang berada di atas nilai 1 terdapat pada komponen 1 dengan nilai sebesar 5,004 sehingga faktor yang terbentuk hanya 1 faktor. Faktor yang terbentuk tersebut dapat dijelaskan oleh varians dari indikator-

indikator pada dimensi kebijakan sebesar 62,550%. Setelah mengetahui bahwa faktor terbentuk hanya 1, bisa diartikan bahwa seluruh indikator (8 item) yang dipakai untuk mengukur kebijakan sudah valid dan hanya menjelaskan satu faktor yaitu kebijakan.

Nilai *loading* faktor memberikan gambaran besarnya hubungan atau korelasi setiap indikator terhadap faktor yang terbentuk, dalam hal ini faktor kebijakan. Tabel 3 *Component Matrix^a* berisi indikator-indikator kebijakan dengan nilai *loading* untuk tiap faktor. Komponen atau faktor yang terbentuk hanya 1 yaitu kebijakan dengan nilai *loading* tiap indikator di atas 0,5 artinya semua indikator memiliki korelasi yang kuat dengan faktor kebijakan. Indikator yang memiliki pengaruh sangat besar atau berhubungan paling erat dengan dimensi kebijakan adalah indikator visi dan misi terkait TIK dengan nilai *loading* faktor tertinggi (0,846). Skala prioritas penerapan TIK juga memiliki hubungan yang erat dan memiliki pengaruh kuat terhadap pembentukan faktor kebijakan sedangkan surat keputusan memiliki hubungan paling rendah dibandingkan indikator yang lain (nilai *loading* faktor = 0,648) meskipun hubungan dengan faktor kebijakan ini masih bisa dibilang kuat karena di atas 0,5.

Tabel 3. *Component Matrix^a* Dimensi Kebijakan

<i>Indikator</i>	<i>Component</i>
Manajemen/proses kebijakan	,827
Visi dan misi	,846
Strategi kebijakan	,793
Standar atau panduan	,818
Peraturan pemanfaatan TIK	,811
Surat keputusan	,648
Skala prioritas penerapan TIK	,837

Indikator	Component
Manajemen/proses kebijakan	,827
Visi dan misi	,846
Strategi kebijakan	,793
Manajemen risiko	,728

Dimensi Kelembagaan

Dimensi kelembagaan pada Tabel 4 KMO memiliki nilai tinggi yaitu 0,798 yang artinya data cukup efektif digunakan dalam penelitian. Nilai signifikansi untuk *Bartlett's Test* adalah 0,00 atau berada di bawah 0,05, artinya faktor analisis cukup efektif untuk digunakan, sehingga indikator-indikator dan data yang ada bisa digunakan untuk analisis faktor. Berdasarkan hasil di atas maka data dinyatakan memenuhi syarat untuk dilakukan analisis faktor. Langkah selanjutnya adalah menentukan banyaknya faktor yang akan terbentuk dengan melihat nilai *Eigenvalues*.

Tabel 4. KMO and Bartlett's Test Dimensi Kelembagaan

<i>Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.</i>		,798
<i>Bartlett's Test of Sphericity</i>	Sig.	,000

Tabel 5. Total Variance Explained Dimensi Kelembagaan

Component	Initial Eigenvalues		
	Total	% of Variance	Cumulative %
1	2,669	53,381	53,381
2	,773	15,461	68,842
:	:	:	:
5	,440	8,791	100,000

Tabel 5 untuk dimensi kelembagaan menunjukkan nilai Eigenvalues 2,669 di atas 1 hanya pada komponen 1. Jadi faktor yang akan terbentuk hanya 1 dengan variansi yang dapat dijelaskan oleh 1 faktor sebesar 53,381%. Dapat disimpulkan bahwa seluruh indikator (5 item) yang dipakai untuk mengukur kelembagaan sudah valid dan hanya menjelaskan sebanyak satu buah faktor yaitu kelembagaan.

Tabel 6. Component Matrix^a Dimensi Kelembagaan

Indikator	Component
	1
Organisasi struktural	,732
Dokumen tupoksi	,784
Sistem dan prosedur kerja	,661
Kelengkapan unit dan aparatur	,730
Program pengembangan SDM	,740

Pada Tabel 6 *Component Matrix* menunjukkan bahwa komponen atau faktor yang terbentuk hanya 1 yaitu kelembagaan dengan nilai *loading factor* tiap indikator di atas 0,5. Hal ini berarti semua indikator memiliki pengaruh yang kuat terhadap faktor kelembagaan yang terbentuk. Indikator dokumen tupoksi memiliki nilai *loading factor* tertinggi 0,784 artinya indikator ini menjadi ciri utama atau yang paling menentukan faktor kelembagaan. Pada dimensi kelembagaan ini nilai *loading factor* terkecil ditunjukkan oleh indikator sistem dan prosedur kerja dengan nilai sebesar 0,661.

Kelima indikator yang dikonfirmasi pada dimensi kelembagaan terbukti membentuk konstruk laten kelembagaan. Indikator-indikator tersebut

adalah organisasi struktural, dokumen tupoksi, sistem dan prosedur kerja, kelengkapan unit dan aparatur, dan program pengembangan SDM.

Dimensi Infrastruktur

Dimensi infrastruktur pada Tabel 7 KMO memiliki nilai sangat tinggi yaitu 0,878 yang artinya data cukup efektif digunakan dalam penelitian. Nilai signifikansi untuk *Bartlett's Test* adalah 0,00 atau berada di bawah 0,05, artinya faktor analisis cukup efektif untuk digunakan. Berdasarkan hasil tersebut maka indikator-indikator dan data yang ada bisa digunakan untuk analisis faktor.

Tabel 7. KMO and Bartlett's Test Dimensi Infrastruktur

<i>Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.</i>			,878
<i>Bartlett's Test of Sphericity</i>	<i>Sig.</i>		,000

Tabel 8. Total Variance Explained Dimensi Infrastruktur

<i>Component</i>	<i>Initial Eigenvalues</i>		
	<i>Total</i>	<i>% of Variance</i>	<i>Cumulative %</i>
1	4,723	67,467	67,467
2	,769	10,986	78,453
3	,508	7,253	85,706
4	,346	4,944	90,650
5	,277	3,960	94,611
6	,208	2,972	97,583
7	,169	2,417	100,000

Pada Tabel 8 dimensi infrastruktur, nilai *Eigenvalues* di atas 1 hanya terdapat pada komponen 1 yaitu sebesar 4,723 sehingga faktor yang akan terbentuk hanya 1. Faktor infrastruktur yang terbentuk dapat dijelaskan oleh varians dari indikator-indikatornya sebesar 67,467%. Indikator-indikator yang berpengaruh terhadap faktor

infrastruktur adalah *data center* dan aplikasi pendukung, jaringan data, keamanan terencana dan terevaluasi, fasilitas pendukung, dokumen *disaster recovery*, pemeliharaan infrastruktur TIK, dan inventaris peralatan.

Tabel 9. Component Matrix^a Dimensi Infrastruktur

Indikator	<i>Component</i>
	1
<i>Data center</i> dan aplikasi	,865
Jaringan data	,906
Keamanan terencana dan	,853
Fasilitas pendukung	,858
Dokumen <i>disaster recovery</i>	,771
Pemeliharaan infrastruktur TIK	,858
Inventaris peralatan	,600

Tabel 9 *Component Matrix* menunjukkan bahwa komponen atau faktor yang terbentuk hanya 1 yaitu infrastruktur dengan nilai *loading* tiap variabel di atas 0,5 artinya semua indikator, yang dalam hal ini ada 7 indikator, bisa masuk/menjelaskan faktor infrastruktur. Nilai *loading* faktor tertinggi 0,906 pada indikator jaringan data artinya indikator jaringan data menjadi ciri utama atau indikator yang paling berpengaruh terhadap faktor infrastruktur. Indikator yang memiliki pengaruh terkecil dibandingkan dengan indikator yang lain adalah inventarisasi peralatan sebesar 0,600.

Dimensi Aplikasi

Nilai KMO dimensi aplikasi dapat dilihat pada Tabel 10 yaitu sebesar 0,799. Nilai ini tergolong nilai tinggi yang artinya data cukup efektif digunakan dalam penelitian.

Tabel 10. KMO and Bartlett's Test Dimensi Aplikasi

<i>Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.</i>		,799
<i>Bartlett's Test of Sphericity</i>	<i>Sig.</i>	,000

Nilai signifikansi untuk *Bartlett's Test* adalah 0,00 atau berada di bawah 0,05, artinya faktor analisis cukup efektif untuk digunakan. Dapat disimpulkan bahwa variabel dan data yang ada bisa digunakan untuk analisis faktor pada dimensi aplikasi.

Tabel 11. Total Variance Explained Dimensi Aplikasi

<i>Component</i>	<i>Initial Eigenvalues</i>		
	<i>Total</i>	<i>% of Variance</i>	<i>Cumulative %</i>
1	4,47	44,758	44,758
2	1,04	10,473	55,230
3	,921	9,206	64,436
4	,788	7,882	72,318
5	,698	6,983	79,301
6	,622	6,222	85,523
7	,532	5,315	90,838
8	,428	4,276	95,114
9	,259	2,587	97,701
10	,230	2,299	100,000

Pada Tabel 11 dimensi aplikasi terlihat nilai *Eigenvalues* di atas 1 pada komponen 1 (disebut sebagai faktor 1) yaitu 4,476 dan pada komponen 2 (disebut sebagai faktor 2) yaitu 1,047. Pada dimensi aplikasi ini faktor yang akan terbentuk ada 2 yaitu komponen 1/faktor 1 dengan varians yang dapat dijelaskan oleh indikator-indikatornya sebesar 44,758% dan komponen 2/faktor 2 dengan varians

yang dapat dijelaskan oleh indikator-indikatornya sebesar 10,473%.

Pada analisis faktor konfirmatori, faktor yang diharapkan terbentuk hanya 1 faktor. Secara logika jika indikator-indikator tersebut valid maka hanya akan terbentuk 1 faktor yaitu faktor aplikasi. Terbentuknya 2 faktor menunjukkan bahwa ada indikator uji yang tidak valid. Agar faktor indikator-indikator dimensi aplikasi yang terbentuk hanya 1 maka perlu dilakukan proses lagi dengan mengeluarkan indikator yang tidak valid. Hal ini dilakukan dengan mengeluarkan variabel yang memiliki nilai MSA di bawah 0,05 atau nilai MSA terkecil yang dapat dilihat pada tabel *anti-image matrices*.

Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan SPSS, nilai *anti-image matrices* menunjukkan MSA situs web 0,870, MSA pelayanan publik 0,824, MSA administrasi dan manajemen umum 0,827, MSA administrasi legislasi 0,821, MSA manajemen pembangunan 0,823, MSA manajemen keuangan 0,716, MSA manajemen kepegawaian 0,802, MSA dokumentasi aplikasi 0,766, MSA inventarisasi aplikasi 0,760, dan MSA interoperabilitas aplikasi adalah 0,826. Di antara indikator-indikator tersebut, indikator manajemen keuangan memiliki MSA terkecil dibandingkan indikator-indikator yang lain, sehingga indikator ini dikeluarkan dari analisis. Pada analisis berikutnya indikator manajemen keuangan tidak dimasukkan pada proses.

Tabel 12. KMO and Bartlett's Test Dimensi Aplikasi

<i>Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.</i>		0,834
<i>Bartlett's Test of Sphericity</i>	<i>Sig.</i>	,000

Tabel 12 merupakan hasil pengolahan data setelah indikator manajemen keuangan dikeluarkan. Nilai KMO menjadi 0,834 yang menunjukkan peningkatan nilai dibandingkan KMO sebelumnya, dan bisa diartikan data cukup efektif digunakan dalam penelitian. Nilai signifikansi untuk *Bartlett's Test* adalah 0,00 atau berada di bawah 0,05, artinya faktor analisis cukup efektif untuk digunakan. Variabel dan data yang ada bisa digunakan untuk analisis faktor.

Tabel 13. *Total Variance Explained* Dimensi Aplikasi

Component	Initial Eigenvalues		
	Total	% of Variance	Cumulative %
1	4,149	46,096	46,096
2	,986	10,956	57,052
3	,879	9,766	66,818
4	,785	8,726	75,544
5	,625	6,941	82,485
6	,534	5,934	88,419
7	,439	4,880	93,299
8	,345	3,831	97,130
9	,258	2,870	100,000

Pada Tabel 13 dimensi aplikasi terlihat nilai *Eigenvalues* di atas 1 yaitu 4,149 pada komponen 1 (disebut sebagai faktor 1), sehingga faktor yang akan terbentuk hanya ada satu yaitu komponen 1/ faktor 1 dengan varians yang dapat dijelaskan oleh indikator-indikatornya sebesar 46,096%. Dalam hal ini ada 9 indikator yang valid yaitu situs web, aplikasi pelayanan publik, administrasi dan manajemen umum, administrasi legislasi, manajemen pembangunan, manajemen kepegawaian, dokumentasi aplikasi, inventarisasi aplikasi, dan interoperabilitas aplikasi.

Tabel 14. *Component Matrix^a* Dimensi Aplikasi

Indikator	Component 1
Situs web	,543
Pelayanan publik	,675
Administrasi dan manajemen	,763
Administrasi legislasi	,682
Manajemen pembangunan	,675
Manajemen kepegawaian	,730
Dokumentasi aplikasi	,752
Inventarisasi aplikasi TIK	,666
Interoperabilitas aplikasi	,595

Tabel 14 *Component Matrix* menunjukkan bahwa komponen atau faktor yang terbentuk hanya 1 yaitu aplikasi dengan nilai *loading* tiap indikator di atas 0,5 artinya semua indikator yang dalam hal ini ada 9 indikator bisa masuk/menjelaskan faktor aplikasi.

Dimensi Perencanaan

KMO/*Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy* menunjukkan kecukupan data yang dipakai dalam penelitian dan seberapa berguna data dalam penelitian. Jika angkanya di atas 0,5 berarti data cukup berguna untuk digunakan dalam penelitian.

Tabel 16. *KMO and Bartlett's Test* Dimensi Perencanaan

<i>Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.</i>	,774
<i>Bartlett's Test of Sphericity</i> Sig.	,000

Tabel 16 menunjukkan nilai KMO yang tinggi yaitu 0,774 artinya data cukup efektif digunakan dalam penelitian. Nilai signifikansi *Bartlett's Test*

pada Tabel 17 adalah 0,00 atau berada di bawah 0,05, artinya faktor analisis cukup efektif untuk digunakan. Dapat disimpulkan bahwa variabel dan data yang ada bisa digunakan untuk analisis faktor.

Pada Tabel 17 dimensi perencanaan, nilai *Eigenvalues* di atas 1 hanya ditunjukkan komponen 1 yaitu sebesar 3,401. Jadi faktor yang akan terbentuk hanya 1 dengan varians yang dapat dijelaskan oleh indikator-indikatornya untuk 1 faktor sebesar 68,024%. Seluruh indikator (5 item) yaitu organisasi perencanaan, sistem perencanaan, dokumentasi masterplan, implementasi masterplan, dan anggaran dalam RPJMD/RKPD yang dipakai untuk mengukur dimensi perencanaan sudah valid dan hanya menjelaskan sebanyak satu buah faktor yaitu perencanaan.

Tabel 17. *Total Variance Explained* Dimensi Perencanaan

Component	Initial Eigenvalues		
	Total	% of Variance	Cumulative %
1	4,149	46,096	46,096
2	,986	10,956	57,052
3	,879	9,766	66,818
4	,785	8,726	75,544
5	,625	6,941	82,485
6	,534	5,934	88,419
7	,439	4,880	93,299
8	,345	3,831	97,130
9	,258	2,870	100,000

Pada dimensi perencanaan tingkat provinsi, kelima indikator yang dikonfirmasi terbukti membentuk kontrak laten perencanaan. Tabel 18 *Component Matrix* menunjukkan bahwa komponen atau faktor yang terbentuk hanya 1 yaitu perencanaan dengan nilai *loading factor* tiap indikator di atas 0,5 artinya semua indikator yang

dalam hal ini ada 5 indikator bisa masuk/menjelaskan faktor perencanaan.

Tabel 18. *Component Matrix* Dimensi Aplikasi

Indikator	Component
	1
Organisasi perencanaan	,876
Sistem perencanaan	,868
Dokumentasi masterplan	,837
Implementasi masterplan	,750
Anggaran dalam RPJMD/RKPD	,786

Berdasarkan analisis tiap dimensi tersebut dapat dilihat bahwa pada dimensi kebijakan di tingkat provinsi, kedelapan indikator yang dikonfirmasi terbukti membentuk kontrak laten kebijakan. Indikator-indikator tersebut adalah manajemen/proses kebijakan, visi dan misi, strategi kebijakan, standar atau panduan pemanfaatan TIK, peraturan pemanfaatan TIK, surat keputusan, skala prioritas penerapan TIK, dan manajemen risiko. Dari nilai *loading factor* pada indikator-indikator kebijakan, visi dan misi TIK memberikan pengaruh paling besar dibandingkan indikator yang lain. Hal ini menunjukkan bahwa visi yang jelas sangat penting dengan berorientasi pada masa depan. Visi ini berfungsi sebagai pemberi semangat dan dorongan untuk mencapai tujuan demi kesuksesan implementasi *e-government*. Walaupun visi yang jelas tentang kondisi ideal yang ingin dicapai sudah ada, namun tidak kalah penting untuk menetapkan misi yang akan dilakukan. Misi berguna agar visi bisa menjadi lebih nyata untuk dicapai dan misi haruslah selaras dengan budaya organisasi yang ada. Skala prioritas penerapan TIK juga memiliki pengaruh besar dalam membentuk kebijakan. Hal ini berhubungan dengan pentingnya menetapkan

prioritas yang akan dilakukan dan menentukan penerapan TIK yang penting demi mendukung kesuksesan implementasi *e-government*. Manajemen atau proses kebijakan yang berpengaruh tinggi dalam membentuk variabel kebijakan menunjukkan bahwa pemerintah provinsi telah menerapkan manajemen yang baik dalam mendukung implementasi *e-government*. Manajemen risiko yang mempunyai pengaruh lebih tinggi dibandingkan surat keputusan menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah menerapkan manajemen risiko dalam penerapan TIK meskipun pengaruhnya tidak terlalu besar karena evaluasi internal dan independen belum dilaksanakan dengan maksimal. Surat keputusan memiliki kontribusi paling rendah pada dimensi ini dilihat dari masih sedikitnya jumlah surat keputusan terkait TIK yang dibuat oleh pemerintah daerah.

Kelima indikator yang dikonfirmasi pada dimensi kelembagaan terbukti membentuk konstruk laten kelembagaan. Indikator-indikator tersebut adalah organisasi struktural, dokumen tupoksi, sistem dan prosedur kerja, kelengkapan unit dan aparatur, serta program pengembangan SDM. Berdasarkan nilai *loading factor* pada indikator-indikator kelembagaan, tidak ada faktor yang dominan berpengaruh artinya semua indikator memiliki pengaruh yang kuat terhadap faktor kelembagaan yang terbentuk. Besarnya sumbangsih yang diberikan oleh indikator dokumen tupoksi merupakan indikator yang paling berpengaruh terhadap dimensi kelembagaan meskipun nilainya tidak jauh berbeda dengan indikator organisasi struktural, kelengkapan unit dan aparatur, dan program pengembangan SDM. Hal ini menunjukkan bahwa dokumen tugas dan fungsi dari

organisasi dan unit kerja berpengaruh paling besar dan menentukan dimensi kelembagaan. Pemerintah provinsi telah membuat dan memiliki dokumen tupoksi organisasi dengan lebih baik dibandingkan dengan indikator yang lain. Program pengembangan SDM memberikan nilai sumbangsih terbesar kedua untuk dimensi kelembagaan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah melakukan program pengembangan SDM pada bidang TIK dalam mendukung pelaksanaan implementasi *e-government*. Indikator organisasi struktural dan indikator kelengkapan unit dan aparatur memiliki sumbangsih yang tidak jauh berbeda nilainya terhadap dimensi kelembagaan. Hal ini menunjukkan bahwa bagan organisasi pemerintah daerah sudah beroperasi dan dilaksanakan, sedangkan inventarisasi dan pendataan tenaga kerja sudah cukup baik berdasar pada ketersediaan SDM sesuai dengan jumlah dan kompetensi yang dibutuhkan. Sistem dan prosedur kerja merupakan indikator yang memberikan pengaruh paling kecil dibandingkan variabel yang lain, hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan sistem dan prosedur kerja yang lengkap dan terdokumentasi masih kurang jika dibandingkan indikator yang lain, meskipun indikator ini bisa dikatakan memiliki hubungan yang kuat dengan dimensi kelembagaan karena nilainya di atas 0,5.

Pada dimensi infrastruktur di tingkat provinsi, ketujuh indikator yang dikonfirmasi terbukti membentuk konstruk laten infrastruktur. Berdasarkan nilai *loading factor* pada indikator-indikator infrastruktur, indikator jaringan data merupakan indikator yang paling dominan memberikan pengaruh dengan nilai *loading factor* tertinggi 0,906. Dominannya indikator jaringan data

ini dikaitkan dengan baiknya ketersediaan jaringan komputer, cakupan jaringan dalam organisasi, ketersediaan perangkat keras dan lunak, ketersediaan akses internet (*bandwidth*), dan *service delivery channel* seperti web, email, telepon/*mobile phone/smartphone* (*mobile internet*), SMS. Indikator-indikator yang lain juga memberikan kontribusi yang baik karena memiliki nilai *loading factor* di atas 0,5. Indikator *data center* dan aplikasi pendukung, keamanan terencana dan terevaluasi, fasilitas pendukung, dan pemeliharaan infrastruktur TIK menunjukkan nilai *loading factor* yang cukup tinggi yaitu di atas 0,850. Hal ini dikaitkan dengan adanya *data center* dan DRC, peranti keras *server*, sistem operasi, aplikasi pendukung, disertai dengan peranti keras dan peranti lunak pengamanan sistem informasi, kebijakan/prosedur pengamanan sistem informasi dan fasilitas pendukung seperti keamanan fisik, ketersediaan listrik, dan HVAC.

Dokumen *disaster recovery* (0,771) dan inventaris peralatan (0,600) lebih rendah dibandingkan indikator yang lain meskipun kedua indikator ini bisa dikatakan memiliki hubungan atau pengaruh yang kuat terhadap dimensi infrastruktur. Hal ini menunjukkan bahwa mitigasi dan prosedur penanggulangan bencana, fasilitas DRC, proses replikasi bukan menjadi prioritas utama karena pemerintah provinsi masih mengutamakan adanya jaringan data yang mendukung kesuksesan pelaksanaan *e-government*. Inventarisasi peralatan TIK yang terdiri dari inventarisasi dan manajemen aset, pemahaman tentang inventarisasi, pemahaman tentang aset *life cycle*, kebijakan inventarisasi dan manajemen aset, dengan ditunjang adanya SOP (SOP untuk pencatatan lokasi, tipe, penggunaan, prioritas penggunaan, pengguna, disposal (*green*

ICT)) belum dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah provinsi karena pemerintah provinsi menganggap hal ini bukan hal yang menjadi prioritas sehingga tidak mendapatkan perhatian. Pemerintah provinsi menganggap jaringan data adalah hal yang utama dalam mendukung pelaksanaan implementasi *e-government* agar bisa lancar sehingga jaringan data berpengaruh sangat besar dan menjadi ciri utama terhadap dimensi infrastruktur.

Pada dimensi aplikasi di tingkat provinsi, dari sepuluh indikator yang dikonfirmasi, hasilnya sembilan indikator terbukti membentuk konstrak laten aplikasi. Berdasarkan nilai *loading factor* pada indikator-indikator aplikasi, indikator aplikasi administrasi dan manajemen umum menjadi ciri utama atau indikator yang paling berpengaruh terhadap aplikasi dengan nilai *loading factor* tertinggi 0,763. Dominannya indikator administrasi dan manajemen umum ini dikaitkan dengan baiknya dan sudah tersedianya surat elektronik, sistem dokumentasi elektronik, sistem pendukung keputusan, kolaborasi dan koordinasi, serta manajemen pelaporan pemerintah. Dokumentasi aplikasi menduduki posisi kedua dalam dimensi aplikasi. Pemerintah provinsi telah memiliki dokumentasi aplikasi yang terdiri dari kode sumber, buku panduan, dokumen arsitektur atau desain, dokumen teknis, dokumen kebutuhan perangkat lunak, dan struktur data. Manajemen kepegawaian memberikan sumbangsih yang cukup tinggi (di atas 0,7) untuk mempengaruhi pembentukan dimensi aplikasi. Manajemen kepegawaian tingkat provinsi sudah cukup baik untuk diterapkan yaitu dengan memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan untuk implementasi *e-government* yang baik. Pemerintah

daerah telah melakukan dan memiliki sistem penerimaan pegawai secara *online*, sistem absensi dan penggajian, sistem penilaian kinerja, dan sistem pendidikan dan latihan. Indikator lainnya juga memberikan kontribusi yang baik karena memiliki nilai *loading factor* di atas 0,5 yaitu indikator situs web, aplikasi fungsional utama terkait pelayanan publik, administrasi legislasi, manajemen pembangunan, dokumentasi aplikasi, inventarisasi aplikasi, dan interoperabilitas aplikasi. Administrasi legislasi juga memberikan pengaruh yang cukup kuat terhadap dimensi aplikasi ini. Hal ini terlihat dengan adanya Sistem Administrasi DPRD, sistem pemilu daerah, katalog hukum, serta peraturan dan perundangan yang telah diterapkan oleh pemerintah daerah. Pada indikator manajemen pembangunan, pemerintah provinsi telah memiliki SIM Data Pembangunan, perencanaan pembangunan daerah, sistem pengadaan barang dan jasa, pengelolaan dan monitoring proyek/kegiatan, sistem evaluasi dan informasi hasil pembangunan.

Indikator manajemen pembangunan dan pelayanan publik memberikan sumbangsih dan pengaruh yang sama besar terhadap pembentukan dimensi aplikasi. Pada indikator pelayanan publik, pemerintah daerah telah memiliki sistem kependudukan, perpajakan dan retribusi, pendaftaran dan perizinan, bisnis dan investasi, pengaduan masyarakat, publikasi informasi umum dan pemerintahan. Indikator aplikasi manajemen keuangan tidak valid untuk digunakan pada penilaian PeGI tingkat provinsi. Hal ini disebabkan aplikasi manajemen keuangan merupakan aplikasi yang harus ada jika dibandingkan aplikasi yang lain. Aplikasi manajemen keuangan seperti sistem anggaran, sistem kas dan perbendaharaan, dan

sistem akuntansi merupakan aplikasi yang sudah wajib ada dan seragam baik untuk pemerintah pusat maupun pemerintah daerah karena Kementerian Keuangan sebagai regulator telah menyeragamkan dan mewajibkan seluruh instansi menggunakan aplikasi yang diberikan. Hal ini bisa dibandingkan dengan aplikasi manajemen pembangunan dan manajemen kepegawaian yang masih bisa atau sebagian masih dilakukan dengan manual dan tidak diwajibkan menggunakan aplikasi khusus.

Pada dimensi perencanaan di tingkat provinsi, kelima indikator yang dikonfirmasi terbukti membentuk kontrak laten perencanaan. Nilai *loading factor* tertinggi 0,876 ditunjukkan indikator organisasi perencanaan artinya indikator organisasi perencanaan menjadi ciri utama atau indikator yang paling berpengaruh terhadap dimensi perencanaan. Indikator yang memiliki pengaruh terkecil dibandingkan dengan indikator yang lain adalah implementasi masterplan sebesar 0,750. Dominannya indikator organisasi perencanaan dikaitkan dengan adanya fungsi atau bagian yang melakukan perencanaan. Tidak hanya indikator organisasi perencanaan saja yang memberikan kontribusi yang baik, sistem perencanaan, dokumentasi masterplan, implementasi masterplan, dan anggaran dalam RPJM/RKPD juga memberikan kontribusi yang baik.

Hasil penelitian ini memberikan dampak terhadap Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) selaku instansi yang berwenang untuk menyelenggarakan urusan di bidang komunikasi dan informatika dalam pemerintahan dan bagi PeGI.

Kementerian Komunikasi dan Informatika

Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai instansi yang berwenang dalam menyelenggarakan urusan di bidang komunikasi dan informatika dalam pemerintahan diharapkan dapat membuat pedoman tata kelola *e-government* yang bisa digunakan oleh seluruh pemerintah daerah atau membuat standar minimal yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan tata kelola *e-government* sehingga kualitas pelaksanaan *e-government* bisa seragam. Selain itu, Kemkominfo dapat membuat standar untuk teknologi dan infrastruktur yang bisa digunakan di daerah. Aplikasi yang disediakan oleh Kemkominfo saat ini adalah aplikasi Manajemen Integrasi dan Pertukaran Data (Mantra), administrasi perkantoran (siMAYA), Pegawai Negeri Sipil *Mail* (PNS *Mail*), *Private Network Security Box* (PNS *Box*) yang bisa digunakan oleh instansi pusat dan daerah. Kemkominfo dapat memberikan bantuan bagi daerah dengan menyediakan aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan sesuai dengan bidang kerja instansi masing-masing untuk menghemat pengadaan aplikasi. Selain itu, manfaat yang juga dapat diperoleh adalah aplikasi yang dimiliki pemerintah daerah bisa seragam dan interoperabilitas aplikasi pun sekaligus bisa dicapai, sehingga jika pemerintah pusat membutuhkan data, dengan cepat dapat diproses oleh daerah. Kemkominfo diharapkan tidak hanya menyediakan aplikasi saja tetapi memberikan bimbingan teknis penggunaan aplikasi yang dikembangkan tersebut kepada pemerintah daerah dan dilakukan monitoring untuk melihat kendala dan kekurangan dari aplikasi-aplikasi tersebut.

PeGI

Penelitian ini memberikan gambaran bahwa aplikasi manajemen keuangan tidak valid digunakan sebagai indikator yang ditanyakan pada penilaian PeGI. Berdasarkan hasil tersebut maka perlu dikembangkan aplikasi-aplikasi lain sebagai bahan penilaian seperti aplikasi yang digunakan bagi instansi/SKPD sesuai dengan nama atau menggambarkan fungsi yang dilakukan.

Beberapa aplikasi yang telah dikembangkan oleh pemerintah Provinsi DI Yogyakarta bisa menjadi contoh penilaian bagi dimensi aplikasi. Aplikasi-aplikasi yang telah dikembangkan ini adalah *m-transport* (Dinas Perhubungan), *Jogja Learning Gateway* (Dinas Pendidikan), *Jogja Sehat* (Dinas Kesehatan), *Agricenter* (Dinas Pertanian), *Fishery Business Center* (Dinas Perikanan), *Jogja Jobinfo* (Dinas Tenaga Kerja), dan *Jogja Invest* (Dinas Koordinasi Penanaman Modal).

PENUTUP

Kesimpulan

Faktor kebijakan terdiri dari manajemen/proses kebijakan, visi dan misi, strategi kebijakan, standar atau panduan pemanfaatan TIK, peraturan pemanfaatan TIK, surat keputusan, skala prioritas penerapan TIK, dan manajemen risiko. Faktor kelembagaan yaitu indikator organisasi struktural, dokumen tupoksi, sistem dan prosedur kerja, kelengkapan unit dan aparatur, dan program pengembangan SDM. Faktor infrastruktur terdiri dari *data center* dan aplikasi pendukung, jaringan data, keamanan terencana dan terevaluasi, fasilitas pendukung, dokumen *disaster recovery*, pemeliharaan infrastruktur TIK, dan inventaris peralatan. Faktor aplikasi terdiri dari situs web,

pelayanan publik, administrasi dan manajemen umum, administrasi legislasi, manajemen pembangunan, manajemen kepegawaian, dokumentasi aplikasi, inventarisasi aplikasi, dan interoperabilitas aplikasi. Faktor perencanaan dipengaruhi oleh organisasi perencanaan, sistem perencanaan, dokumentasi masterplan, implementasi masterplan, dan anggaran dalam RPJMD/RKPD.

Saran

Berdasarkan pembahasan maka saran-saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

Kementerian Komunikasi dan Informatika diharapkan dapat membuat pedoman tata kelola *e-government* dan standar minimal untuk pemilihan teknologi dan infrastruktur agar pelaksanaan *e-government* di pemerintah daerah bisa berjalan dengan optimal karena telah memenuhi standar yang ditetapkan. Selain itu, membantu menyediakan aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan bagi daerah sesuai dengan kebutuhan bidang kerja untuk menghemat anggaran pembuatan aplikasi yang berulang antar daerah.

Penelitian ini memberikan gambaran bahwa aplikasi manajemen keuangan tidak valid digunakan sebagai indikator yang ditanyakan pada penilaian PeGI. Berdasarkan hasil tersebut maka perlu dikembangkan aplikasi-aplikasi lain sebagai bahan penilaian seperti aplikasi yang digunakan oleh instansi/SKPD sesuai dengan nama atau menggambarkan fungsi yang dilakukan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Inpres No. 3 Tahun 2003. (2003). Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government* Indonesia.
- Nag Yeon Lie. (2010). "Penerapan *e-government*", Seri Modul 3, *Asian and Pacific Training Centre for Information and Communication Technology for Development*.
- Direktorat *e-Government*. (2011). Pemingkatan *e-Government* Indonesia (PeGI) Tingkat Provinsi Tahun 2011, Dirjen Aptika Kemenkominfo.
- Worldbank. (2011). *Definition of e-government*.
- Pacific Council International Policy*. (2002). *Working Group on e-government in the Developing World, Roadmap for e-government in the Developing World 10 Questions e-government Leaders Should Ask Themselves*
- Palvia Jain, Shailendra and Sharma S. Sushil. (2007). *e-Government and e-Governmenternance : Definition/Domain Framework and Status around the World*, Computer Society of India.
- United Nations. (2012). *United Nations e-Government Survey 2012 e-Government for The People*.
- Kemkominfo. (2008). Pemingkatan *e-government*.
- Ariyani, Pipin Farida. (2009). *Kajian Kerangka Kerja Pemingkatan e-Government di Tingkat Kabupaten/Kotamadya*, Karya Akhir, Magister Teknologi Informasi, Universitas Indonesia.
- Giri, C Narayan. (2004). *Multivariate Statistical Analysis Second Edition, Revised and Expanded*. New York: Marcell Dekker Inc.

